



WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 76 TAHUN 2022
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah Kota Bogor telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 76 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah Kota Bogor;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi dan kebutuhan Perangkat Daerah tahun 2023 maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah Kota Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 76 TAHUN 2022 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

Pasal I

Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 76) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

18 Agustus 2023

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal

WALI KOTA BOGOR,

BIMA ARYA

18 Agustus 2023

Diundangkan di Bogor
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

SEKRETARIAT
DAERAH

SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

35

BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 76 TAHUN 2022 TENTANG ANALISIS
STANDAR BELANJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA BOGOR

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGASATUAN
1	1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	Perencanaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana	Rp 21.400.000.000 - < Rp 21.450.000.000	paket	1825243000
2	1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	Perencanaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana	Rp 21.350.000.000 - < Rp 21.400.000.000	paket	1822325000
3	1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	Perencanaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana	Rp 21.300.000.000 - < Rp 21.350.000.000	paket	1818207000
4	1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	Perencanaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana	Rp 21.250.000.000 - < Rp 21.300.000.000	paket	1815281000
5	1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	Perencanaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana	Rp 21.200.000.000 - < Rp 21.250.000.000	paket	1811752000
6	1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	Perencanaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana	Rp 21.150.000.000 - < Rp 21.200.000.000	paket	1808219000
7	1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	Perencanaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana	Rp 21.100.000.000 - < Rp 21.150.000.000	paket	1804683000
8	1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	Perencanaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana	Rp 21.050.000.000 - < Rp 21.100.000.000	paket	1801143000
9	1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	Perencanaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana	Rp 21.000.000.000 - < Rp 21.050.000.000	paket	1797600000
10	1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	Perencanaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana	Rp 20.950.000.000 - < Rp 21.000.000.000	paket	1794053000
11	1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	Perencanaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana	Rp 20.900.000.000 - < Rp 20.950.000.000	paket	1790503000
12	1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	Perencanaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana	Rp 20.850.000.000 - < Rp 20.900.000.000	paket	1786949000
13	1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	Perencanaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana	Rp 20.800.000.000 - < Rp 20.850.000.000	paket	1783392000
14	1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	Perencanaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana	Rp 20.750.000.000 - < Rp 20.800.000.000	paket	1779831000
15	1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	Perencanaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana	Rp 20.700.000.000 - < Rp 20.750.000.000	paket	1776267000
16	1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	Perencanaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana	Rp 20.650.000.000 - < Rp 20.700.000.000	paket	1772699000
17	1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	Perencanaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana	Rp 20.600.000.000 - < Rp 20.650.000.000	paket	1769128000
18	1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	Perencanaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana	Rp 20.550.000.000 - < Rp 20.600.000.000	paket	1765553000
19	1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	Perencanaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana	Rp 20.500.000.000 - < Rp 20.550.000.000	paket	1761975000
20	1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	Perencanaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana	Rp 20.450.000.000 - < Rp 20.500.000.000	paket	1758393000
21	1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	Perencanaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana	Rp 20.400.000.000 - < Rp 20.450.000.000	paket	1754808000
22	1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	Perencanaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana	Rp 20.350.000.000 - < Rp 20.400.000.000	paket	1751219000
23	1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	Perencanaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana	Rp 20.300.000.000 - < Rp 20.350.000.000	paket	1747627000
24	1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	Perencanaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana	Rp 20.250.000.000 - < Rp 20.300.000.000	paket	1744031000
25	1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	Perencanaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana	Rp 20.200.000.000 - < Rp 20.250.000.000	paket	1740432000

29818	8.1.02.02.13.0001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	Pelatihan Entomolog Tingkat Dasar	Biaya Pelatihan Entomolog Tingkat Dasar (full luring 8 hari)	Orang / Kegiatan	4600000
29819	8.1.02.02.13.0001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	Pelatihan Penanggulangan TB di FKTP dan FKRTL	Biaya Pelatihan Penanggulangan TB di FKTP dan FKRTL (Blended 5 hari, luring 2 hari)	Orang / Kegiatan	3275000
29820	8.1.02.02.13.0001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	Pelatihan Imunisasi bagi Pengelola Program Imunisasi	Biaya Pelatihan Imunisasi bagi Pengelola Program Imunisasi	Orang / Kegiatan	3225000
29821	8.1.02.02.13.0001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	Pelatihan Pengawasan Kualitas lingkungan	Biaya Pelatihan Pengawasan Kualitas Lingkungan (Blended 7 hari luring 2 hari)	Orang / Kegiatan	3225000
29822	8.1.02.02.13.0002	Beban Sosialisasi	Beban Sosialisasi	Penyelenggaraan Sosialisasi dan Promosi Pelayanan Publik.	Kegiatan	9990000
29823	8.1.02.02.13.0002	Beban Sosialisasi	Beban Sosialisasi	Sosialisasi peraturan perundang-undangan.	Kegiatan	9990000
29824	8.1.02.02.13.0003	Beban Bimbingan Teknis	Beban Bimbingan Teknis	Bimbingan Teknis Peningkatan Tenaga Ahli (ASN)	Orang/Kegiatan	13000000
29825	8.1.02.02.13.0003	Beban Bimbingan Teknis	Belanja bimbingan teknis	Biaya disetor kursus singkat/Pelatihan/Bintek/Seminar/Adeksi/Undangan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Setwan	Per Orang	6000000
29826	8.1.02.02.13.0003	Beban Bimbingan Teknis	Belanja bimbingan teknis	Biaya disetor kursus singkat/seminar asdeski	Per Orang	5000000
29827	8.1.02.02.13.0003	Beban Bimbingan Teknis	Belanja Bimbingan Teknis	Biaya disetor kursus singkat/Pelatihan/Bintek/Seminar/Adeksi/Undangan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Setwan	Per Orang	5000000
29828	8.1.02.02.13.0003	Beban Bimbingan Teknis	Belanja bimbingan teknis	Biaya disetor Pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi pimpinan dan anggota DPRD Setwan	Per Orang	17500000
29829	8.1.02.02.13.0004	Beban Diklat Kepemimpinan	Biaya Pendidikan untuk Pejabat Struktural	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	Orang/Kegiatan	29021490
29830	8.1.02.02.13.0004	Beban Diklat Kepemimpinan	Biaya Pendidikan untuk Pejabat Struktural	Pelatihan Kepemimpinan Administrator (Blended Learning)	Orang/Kegiatan	18530153
29831	8.1.02.02.13.0004	Beban Diklat Kepemimpinan	Biaya Pendidikan untuk Pejabat Struktural	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (Blended Learning)	Orang/Kegiatan	15961002
29832	8.1.02.02.13.0004	Beban Diklat Kepemimpinan	Biaya Pendidikan untuk Pejabat Struktural	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	Orang/Kegiatan	22050882
29833	8.1.02.02.13.0004	Beban Diklat Kepemimpinan	Biaya Pendidikan untuk Pejabat Struktural	Pelatihan Kepemimpinan Nasional TK. II	Orang/Kegiatan	38434807
29834	8.1.02.03.06.0005	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	Konsultansi Sistem Informasi Manajemen PSU (Maintenance & Updating) Disperumkim	Spesifikasi: - Maintenance & Updating Sistem Informasi Manajemen PSU	Paket	85000000

